

---

## Analisis Komparatif Praktik Akuntansi di Iran dan Indonesia

Natalis Christian<sup>1</sup>, Arlina<sup>2</sup>, Julie Tryany<sup>3</sup>, Vera Laurence Liang<sup>4</sup>, Yohanis Rerung<sup>5</sup>

<sup>1234</sup>Universitas Internasional Batam

<sup>1234</sup>Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau

<sup>5</sup>Universitas Kristen Indonesia Paulus

<sup>5</sup>Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.13, Daya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

email: [natalis.christian@uib.ac.id](mailto:natalis.christian@uib.ac.id)<sup>1234</sup>, [yohanisrerung85@gmail.com](mailto:yohanisrerung85@gmail.com)<sup>5</sup>

---

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Juli 2024

Received in revised form 2 September 2024

Accepted 10 November 2024

Available online Desember 2024

---

### ABSTRACT

Globalization has driven increasingly international economic integration, pushing countries to adjust their accounting standards. This study compares the accounting practices of Iran and Indonesia through a qualitative analysis of academic literature, accounting regulations, and corporate financial reports considering the different cultural, economic, and legal contexts in the two countries. The research results show that Indonesia adopts Financial Accounting Standards (SAK) which are based on IFRS while Iran uses National Accounting Standards which are adapted from IFRS with modifications according to the local context. IFRS adoption in Indonesia is said to be more advanced and closer than Iran because Iran is facing challenges that affect the country's economy, such as US international sanctions. These differences are also influenced by factors such as legal, cultural and social. Despite the differences, both countries show serious efforts in adapting accounting practices to international standards. Overall, this study provides in-depth insights for accounting practitioners, regulators and policy makers to develop better accounting practices in accordance with the needs of each country in an ever-evolving global context.

**Keywords:** Difference, Accounting Standard, Iran, Indonesia

---

### Abstrak

Globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi internasional yang semakin dalam, mendorong negara-negara untuk menyesuaikan standar akuntansi mereka. Studi ini membandingkan praktik akuntansi negara Iran dan Indonesia melalui analisis kualitatif terhadap literatur akademis, peraturan akuntansi, dan laporan keuangan perusahaan mengingat konteks budaya, ekonomi, dan hukum yang berbeda di kedua negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang didasarkan pada IFRS sementara Iran menggunakan Standar Akuntansi Nasional yang diadaptasi dari IFRS dengan modifikasi sesuai konteks lokal. Pengadopsian IFRS di Indonesia dikatakan lebih maju dan dekat dibandingkan Iran karena Iran sedang menghadapi tantangan yang mempengaruhi perekonomian negara, seperti sanksi internasional AS. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor seperti hukum, budaya, dan sosial. Meskipun terdapat perbedaan, kedua negara tersebut menunjukkan upaya serius dalam menyesuaikan praktik akuntansi dengan standar internasional. Secara keseluruhan, studi ini memberikan

---

Received Juli 30, 2024; Revised September 2, 2024; Accepted November 10, 2024

\*Corresponding author, e-mail address: [natalis.christian@uib.ac.id](mailto:natalis.christian@uib.ac.id)

wawasan penting bagi praktisi akuntansi, regulator, dan pengambil kebijakan untuk mengembangkan praktik akuntansi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara dalam konteks global yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Perbedaan, Standar Akuntansi, Iran, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang telah mengubah lanskap ekonomi global dengan cara yang signifikan. Dengan membuka pintu bagi interaksi ekonomi yang lebih bebas dan lebih intens antara negara-negara di seluruh dunia (Tyas et al., 2023). Globalisasi juga memfasilitasi aliran barang, jasa, modal, dan teknologi di luar batas-batas nasional sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru (Harahap et al., 2024). Selain itu, globalisasi meningkatkan akses ke pengetahuan dan inovasi, memungkinkan negara-negara berkembang untuk mengejar kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas hidup melalui transfer ilmu pengetahuan dan praktik terbaik dari negara-negara maju.

Keberadaan dan pentingnya globalisasi yang diwujudkan melalui perdagangan internasional dan keberadaan perusahaan multinasional (Dewi, 2019), membawa implikasi bahwa ada kebutuhan mendesak untuk standar akuntansi internasional (Lestari, 2024). Standar ini penting untuk memastikan bahwa transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara dapat dicatat dan dilaporkan dengan cara yang konsisten dan transparan (Arja Sadjarto, 1999). Sebagai contoh, perjanjian perdagangan antara Iran dan Indonesia menunjukkan bagaimana globalisasi mendorong interaksi ekonomi lintas batas. Perjanjian ini memungkinkan kedua negara untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa, memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing, dan memperkuat hubungan ekonomi mereka (Santia, 2023).

Untuk mendukung transaksi yang kompleks ini, diperlukan kerangka kerja akuntansi yang memungkinkan perusahaan di kedua negara untuk mencatat dan melaporkan transaksi dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat (Sinatra et al., 2022). Oleh karena itu, standar akuntansi internasional seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menjadi patokan yang sangat penting. IFRS memberikan seperangkat aturan yang diakui secara global, yang membantu dalam menciptakan transparansi, konsistensi, dan keterbandingan dalam laporan keuangan (Bharata et al., 2020).

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di kedua negara dapat diandalkan dan relevan bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia dan Iran sama-sama mengadopsi standar akuntansi IFRS. Meskipun demikian, implementasi standar akuntansi di masing-masing negara tidak selalu sama atau masih memerlukan penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi lokal (Prasetyanto et al., 2023). Sanksi internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat bisa menjadi salah satu kondisi yang mempengaruhi standar akuntansi Iran (Dwihendra & Finaldin, 2021). Dengan demikian, keberadaan standar akuntansi internasional memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efektif dalam lingkungan global, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja baru (Prasetyanto et al., 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang dilakukan untuk membandingkan standar akuntansi di berbagai negara yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti perbandingan standar akuntansi antara Indonesia dan Rusia (Christian et al., 2023), Indonesia dan Thailand (Christian et al., 2021), serta Indonesia dan Italia (Christian et al., 2022). Selain itu, terdapat juga penelitian yang menganalisis perbandingan antara Iran dan Indonesia namun dari sisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan (Christian et al., 2024). Penelitian yang meneliti perbandingan implementasi standar akuntansi antara negara berkembang seperti Iran dan Indonesia masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan komparatif antara kedua negara tersebut dengan analisis yang lebih sesuai dengan konteks lokal Iran saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi perbedaan standar akuntansi, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaannya, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih mendalam tentang perbandingan standar akuntansi antara kedua negara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Standar Pelaporan dan Pengungkapan Keuangan Iran dan Indonesia

Praktik akuntansi di Indonesia dan Iran dipengaruhi oleh standar akuntansi yang diadopsi oleh masing-masing negara, yang mencerminkan lingkungan ekonomi, regulasi, dan budaya setempat. Di Indonesia, standar akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Uno et al., 2019). SAK di Indonesia mengadopsi IFRS secara bertahap untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan

standar internasional, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi akses ke pasar modal global (Indriani et al., 2020). Sejak pengadopsian IFRS, regulasi terhadap industri dan elemen laporan keuangan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. PSAK yang tidak lagi mengacu pada standar internasional ini telah ditarik atau direvisi agar sejalan dengan kerangka kerja baru yang diperkenalkan IFRS (Putra et al., 2019). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan harmonisasi dan konsistensi dalam praktik akuntansi di tingkat global, memperkuat transparansi, serta memfasilitasi perbandingan yang lebih efektif antara laporan keuangan di berbagai negara.

Di sisi lain, standar Akuntansi Iran telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional yang diterbitkan oleh Organisasi Audit Iran, dengan jumlah total mencapai 31 standar per 2012 (Darabi & Salmani, 2012). Standar akuntansi Iran berbasis pada IFRS, dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan ekonomi Iran. Iran telah memulai proses pengadopsian IFRS secara bertahap sejak tahun 2011 melalui Organisasi Sekuritas dan Bursa Iran yang mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran (TSE) untuk menggunakan standar ini dalam penyusunan laporan keuangan mereka (Shuraki et al., 2021). Meskipun ada beberapa upaya untuk mengharmonisasikan IAS dengan IFRS, adopsi penuh belum dilakukan oleh Iran (Stanbic, 2023). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk sanksi internasional, kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi, serta penyesuaian dengan hukum syariah yang mempengaruhi praktik bisnis dan akuntansi di Iran.

## **2.2. Faktor Perbedaan Praktik Akuntansi di Iran dan Indonesia**

Praktik akuntansi di Iran dan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, ekonomi, budaya, dan regulasi masing-masing negara. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan praktik akuntansi di kedua negara tersebut:

### **2.2.1. Sistem Hukum**

Sistem hukum di Iran dipengaruhi oleh syariah (hukum Islam) dan konstitusi negara yang menggabungkan elemen hukum Islam dan sekuler. Guardian Council berperan penting dalam memastikan bahwa semua undang-undang, termasuk yang terkait dengan akuntansi, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti praktik akuntansi di Iran harus selaras dengan norma-norma Islam, mempengaruhi aspek seperti pengakuan pendapatan, penanganan bunga, dan transaksi keuangan lainnya. Sementara itu, sistem hukum Indonesia merupakan kombinasi dari hukum Belanda (warisan kolonial), hukum adat, dan hukum modern. Regulasi akuntansi dan perusahaan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang yang lebih sekuler dibandingkan dengan Iran, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pasar modal.

### **2.2.2. Standar Akuntansi**

Di Iran, standar akuntansi dikembangkan oleh *Iran Accounting Standards Board* (IASB), yang mengadopsi banyak prinsip dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) namun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan syariah. Sebaliknya, di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK Indonesia sangat dipengaruhi oleh IFRS dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan di tingkat internasional (IAI, 2024).

### **2.2.3. Peraturan Pemerintah dan Pengawasan**

Dalam hal peraturan pemerintah dan pengawasan, Iran memiliki beberapa badan seperti IACPA dan otoritas pajak yang mengawasi praktik akuntansi. Peraturan ini sering kali harus disetujui oleh Guardian Council untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariah. Di Indonesia, peran utama dalam mengatur dan mengawasi praktik akuntansi dijalankan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK memiliki otoritas yang luas untuk mengatur dan mengawasi praktik akuntansi di Indonesia. Kewenangannya mencakup menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang, merumuskan regulasi di sektor jasa keuangan, serta menetapkan aturan terkait pengawasan di sektor tersebut (Sari, 2018).

### **2.2.4. Budaya dan Etika**

Budaya dan etika bisnis di Iran sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hal ini tercermin dalam praktik akuntansi yang mematuhi prinsip-prinsip etika Islam. Di Indonesia, budaya bisnis lebih pluralistik dengan pengaruh dari berbagai agama dan tradisi lokal. Etika bisnis dan akuntansi diatur oleh kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mencerminkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme yang berlaku secara internasional (IAI, 2021).

### **2.2.5. Pendekatan Pendidikan dan Pelatihan**

Di Iran, pendidikan akuntansi sering mencakup pengajaran tentang syariah dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam akuntansi. Program sertifikasi seperti CPA yang ditawarkan oleh IACPA juga mencakup komponen syariah. Di Indonesia, pendidikan akuntansi mengikuti kurikulum berbasis standar internasional, termasuk IFRS. Program pendidikan dan sertifikasi akuntansi disediakan oleh berbagai universitas dan lembaga profesional seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi komparatif praktik akuntansi di Indonesia dan Iran adalah penelitian literatur komparatif kualitatif. Pendekatan ini mencakup analisis mendalam terhadap dokumen relevan seperti peraturan akuntansi, laporan keuangan perusahaan, dan literatur akademis dari kedua negara. Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber ini untuk mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi diatur, diterapkan, dan dipahami secara teoritis dan praktis di Indonesia dan Iran. Analisis ini akan fokus pada perbedaan dan persamaan antara metode akuntansi, serta faktor kontekstual yang mempengaruhinya, seperti budaya, sistem hukum, dan sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi interpretasi dan penerapan standar akuntansi di dua negara yang berbeda. Penelitian ini dapat memberikan informasi berharga kepada praktisi akuntansi, regulator, dan pengambil kebijakan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih efektif dan adaptif dalam konteks masing-masing negara. Oleh karena itu, tinjauan literatur komparatif kualitatif dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas dan dinamika praktik akuntansi di Indonesia dan Iran.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Iran**

Akuntansi memiliki sejarah panjang yang membentang hingga sekitar 6000 tahun yang lalu. Dokumen-dokumen akuntansi tersebut pertama kali ditemukan sekitar tahun 3600 SM. Pada zaman kuno Iran, sekitar tahun 500 SM, tepatnya pada masa Kekaisaran Achaemenid, terdapat bukti bahwa pendapatan dan pengeluaran publik telah dicatat dan disimpan dengan baik serta tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi telah ada dan digunakan secara efektif untuk mengelola keuangan negara sejak zaman kuno di Iran. Sejarah perkembangan akuntansi di Iran ini dikelompokkan menjadi tiga era diantaranya era pra-islam, era pasca-islam dan era kontemporer (Mashayekhi & Mashayekh, 2008).

#### **4.1.1. Akuntansi Pada Era Pra-Islam di Iran**

Dokumen sejarah menunjukkan bahwa Iran memiliki sejarah yang gemilang sebagai pemimpin perdagangan darat dan laut terbesar. Pada masa pemerintahan Cyrus Agung, perdagangan telah menjadi prioritas utama. Darius Agung, penerusnya, memberikan perhatian khusus pada infrastruktur jalan dan keselamatan, yang sangat berkontribusi pada perkembangan dan peningkatan perdagangan. Pada periode ini orang Iran memainkan peran utama yang penting dalam perdagangan regional dan internasional.

Pada masa pemerintahan Darius Agung selama era Achaemenid, pemerintah Iran telah menjaga kesejahteraan seluruh warga negara dalam perekonomian yang diatur dan terorganisir dengan baik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, dari yang termiskin hingga yang paling kaya. Evolusi sistem sosial dan ekonomi pada masa itu dapat dicerminkan dalam plakat yang ditemukan di reruntuhan Persepolis (Takht-e Jamshid). Plakat ini merupakan saksi perkembangan perekonomian dari sistem barter primitif menjadi sistem yang lebih kompleks yang menggunakan koin dan uang. Dalam plakat ini tercatat proses ekonomi, termasuk pembayaran, penerimaan penjatahan, dan laporan perdagangan yang rinci dari berbagai wilayah. Selain dari itu, Darius Agung juga diperlihatkan sebagai tokoh kunci dalam urusan ekonomi dan keuangan pada plakat tersebut. Di samping itu juga mencatat peranannya dalam menetapkan petugas pajak dan mengatur aturan pajak, termasuk bagaimana pajak dikumpulkan dan diatur pengeluarannya. Proses ini melibatkan banyak orang, termasuk sekretaris dan konselor, yang bertanggung jawab atas pencatatan semua laporan ekonomi dan penyediaan plakat.

Orang-orang kuno menyimpan dokumen dalam dua bentuk pada zaman dulu - plakat Benteng dan Perbendaharaan Persepolis. Melalui penelitian plakat-plakat ini, kita mendapatkan wawasan penting tentang perkembangan proses akuntansi. Dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi dan pencatatan laporan dilakukan dengan akurat, mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi yang kita kenal saat ini. Angka-angka yang dicatat oleh para akuntan menunjukkan jumlah barang atau jatah dengan tepat, serupa dengan praktik akuntansi saat ini.

Pada 312 SM pemungutan pajak menjadi praktik umum di Iran kuno, terutama pada masa Achaemenid dan era Seleukid. Tidak ada pajak per kapita yang dikenakan selama periode ini. Namun, pada masa Arsacid (mulai dari 187 SM), pajak utamanya bersifat teritorial dan dapat berupa uang tunai atau barang. Pada era ini mulai dikenakan pajak per kapita seperti halnya dengan Bea Cukai (Mashayekhi & Mashayekh, 2008).

#### **4.1.2. Akuntansi di Era Pasca-Islam di Iran - Dari Era Abbasiyah Hingga Qajar**

Selama masa kekuasaan Samaniyah, mayoritas pendapatan pemerintah berasal dari pajak per kapita dan pajak teritorial. Pada periode ini, istilah " Bureau " muncul, yang berasal dari kata yang berarti tagihan, dan berkaitan dengan tugas-tugas akuntansi. Biro bertugas mengawasi estimasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Perhitungan gaji abdi dalem juga dipantau oleh kepala biro ini. Para ahli pemerintah menetapkan semua aturan yang terkait dengan keuangan dan perpajakan, yang dicatat dalam sebuah buku yang juga dikenal sebagai Biro. Ini mencerminkan evolusi konsep keuangan dan perpajakan pada masa itu.

Selama masa kekuasaan Seljuk, diciptakan metode akuntansi bernama Siagh untuk mencatat pendapatan, pengeluaran publik, dan akun keuangan bisnis secara terpisah pada halaman-halaman yang sesuai. Selama periode Safawiyah, di bawah kepemimpinan Shah Ismail dan Shah Abbas, ekonomi Iran berkembang pesat. Salah satu inovasi penting adalah pencatatan catatan perdagangan yang merupakan asal mula jurnal modern. Setiap transaksi pedagang, utang dan piutang didaftarkan dalam catatan perdagangan, yang menjadi dokumen penting bagi pedagang dan sistem peradilan dan dikenakan biaya 5% dari setiap transaksi.

Pada masa Qajar, pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak langsung, pajak properti, bea cukai, dan pendapatan sewa. Pembuatan anggaran pemerintah pertama kali diatur dan diajukan kepada parlemen nasional, menandai langkah penting dalam pengelolaan keuangan negara. Aturan-aturan keuangan pertama disahkan di parlemen, termasuk undang-undang audit dan pajak tembakau. Akuntansi Siagh, yang diperkenalkan pada masa Samaniyah, diselesaikan pada masa ini. "Five Book", yang digunakan untuk pembukuan kelompok-kelompok akun utama diciptakan pada masa ini (Mashayekhi & Mashayekh, 2008).

#### **4.1.3. Akuntansi di Era Kontemporer - Dari Pahlavi (1918-1978) Hingga Sekarang**

Pada era kontemporer di Iran, konsep audit mulai diperkenalkan sebagai respons terhadap perubahan ekonomi negara. Audit pertama kali diwajibkan oleh undang-undang pajak pada tahun 1949, yang muncul dari hasil Revolusi Konstitusional di Iran. Asosiasi Akuntan Terdaftar didirikan pada tahun 1963, diikuti oleh Pusat Akuntan Resmi Iran pada tahun 1966. Lebih lanjut, undang-undang seperti Undang-Undang Bursa Efek Teheran mengharuskan perusahaan yang terdaftar untuk diaudit (Mashayekhi & Mashayekh, 2008).

Setelah revolusi islam tahun 1979, sejumlah besar perusahaan di nasionalisasi (Shuraki et al., 2021). Untuk mengaudit dan memantau perusahaan milik negara tersebut, sektor negara, Organisasi Industri Nasional, dan Organisasi Perencanaan dan Anggaran, serta yayasan semi-pemerintah, seperti Yayasan Mostazafan dan Yayasan Shahid, yang mengendalikan banyak perusahaan yang baru dinasionalisasi, mendirikan organisasi audit mereka sendiri. Akibatnya, permintaan untuk layanan audit sektor swasta menurun drastis. Namun, karena kurangnya standar akuntansi dan audit yang seragam dan nasional, perbandingan laporan keuangan menjadi rendah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pembentukan Iran Audit Organization (IAO) melalui penggabungan tiga organisasi audit negara tersebut dan disahkan pada tahun 1983. Pendirian IAO dianggap sebagai peristiwa paling penting dalam sejarah akuntansi Iran karena IAO berdasarkan undang-undang ditugaskan untuk mengembangkan serangkaian standar akuntansi dan audit nasional untuk pertama kalinya (Mohammadrezaei et al., 2013).

Organisasi ini disetujui oleh parlemen pada tahun 1987 dan menjadi badan hukum dengan independensi finansial. Organisasi Audit ini berafiliasi dengan Kementerian Urusan Ekonomi dan Keuangan dan menggantikan peran firma audit asli (Mashayekhi & Mashayekh, 2008). Otoritas yang mengatur IAO terdiri dari Rapat Umum, Dewan Eksekutif, CEO, dan Dewan Pengawas Tertinggi. Anggota Rapat Umum termasuk Menteri Ekonomi dan Keuangan sebagai ketua, Wakil Presiden Strategis dan Pengawasan, Kepala Bank Sentral Iran, dan dua menteri lainnya yang dipilih oleh Dewan Menteri. Dewan Eksekutif terdiri dari sembilan anggota. CEO dan anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh Rapat Umum. IAO telah mengaudit dan memeriksa kementerian, perusahaan pemerintah, dan semi-pemerintah, serta menerjemahkan dan menerbitkan banyak buku audit dan akuntansi (Mohammadrezaei et al., 2013).

Pada tahun 2001, IAO mengeluarkan Standar Akuntansi Nasional (NAS) 1 hingga 22 berdasarkan Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan penerapannya telah diwajibkan sejak tahun 2001. Hingga saat itu,

Iran memiliki 31 standar akuntansi. Kemudian, Asosiasi Akuntan Publik Bersertifikat Iran (IACPA) juga didirikan berdasarkan RUU Parlemen tahun 1993. Tujuan pembentukan IACPA berdasarkan statuta adalah untuk mempromosikan profesi akuntansi dan audit serta pengawasan profesional terhadap firma audit sektor swasta. Selama 1993-2001, IAO mendominasi pasar audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran (TSE); namun, setelah pembentukan IACPA, banyak firma audit sektor swasta didirikan di bawah IACPA. Dengan demikian, pasar audit Iran telah beralih dari terkonsentrasi ke kompetisi.

Sebagai pelengkap, Kode Tata Kelola Perusahaan Iran (CCGI) pertama disiapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan TSE pada tahun 2004. Kode ini disunting untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perdagangan dan situasi pasar modal pada tahun 2005. Edisi baru CCGI mencakup definisi yang diperlukan, CEO, dewan, struktur kepemilikan, tanggung jawab pemegang saham, konsep audit, akuntabilitas, dan pengungkapan keuangan. Kode ini telah diterapkan oleh perusahaan yang terdaftar di TSE; namun, penerapan kode tersebut tidak diwajibkan. Pertumbuhan pesat TSE berdasarkan rencana privatisasi, pendirian Organisasi Sekuritas dan Bursa (SEO), pertumbuhan cepat lulusan akuntansi, dan ketersediaan infrastruktur hukum dalam beberapa tahun terakhir menjanjikan masa depan yang cerah bagi akuntansi di Iran.

#### 4.2. Kerangka Hukum Akuntansi di Iran

Dasar hukum akuntansi di Iran ditetapkan melalui serangkaian undang-undang, peraturan, dan standar yang dirancang untuk mengatur praktik akuntansi di negara tersebut. Dalam sistem hukum dan keuangan Iran, berbagai elemen dan regulasi berinteraksi untuk membentuk kerangka kerja yang komprehensif bagi tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan. Berikut adalah kerangka hukum akuntansi di Iran:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Dagang: Kitab Undang-undang Hukum Dagang menjadi landasan utama yang mengatur pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengauditan rekening perusahaan. Ini menetapkan standar dasar yang harus diikuti oleh semua entitas bisnis, memastikan konsistensi dan keandalan dalam pelaporan keuangan.
- b. *Audit Organization of Iran* (AOI): AOI adalah badan pengatur utama yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi dan audit di Iran. AOI mengeluarkan standar akuntansi nasional yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Standar-standar ini diadaptasi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) agar sesuai dengan kondisi dan persyaratan lokal.
- c. Standar Akuntansi Nasional: Dikeluarkan oleh AOI, standar ini memberikan panduan rinci mengenai pelaporan keuangan. Perjanjian ini menggabungkan unsur-unsur IFRS namun mencakup modifikasi untuk mencerminkan lingkungan ekonomi Iran dan kebutuhan peraturan.
- d. Undang-undang Perpajakan: Undang-undang perpajakan Iran mengharuskan perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini mencakup peraturan khusus untuk menghitung dan melaporkan penghasilan kena pajak dan pemotongan yang diperbolehkan.
- e. *Securities and Exchange Organization* (SEO): SEO adalah otoritas pengawas pasar keuangan Iran yang mengatur aktivitas bursa, asosiasi, dan lembaga keuangan dengan tujuan menjaga pasar yang transparan dan efisien serta melindungi hak-hak investor. Sebagai lembaga non-pemerintah dengan kemandirian hukum dan keuangan, SEO didanai melalui biaya layanan dan biaya masuk dari perusahaan terdaftar serta pendapatan lainnya. Semua bursa, lembaga keuangan, dan perantara harus terdaftar di SEO untuk beroperasi di pasar keuangan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran juga harus mematuhi persyaratan pelaporan dan pengungkapan tambahan yang ditetapkan oleh SEO untuk memastikan transparansi dan melindungi kepentingan investor.
- f. Hukum Islam (Syariah): Prinsip-prinsip Islam secara signifikan mempengaruhi praktik akuntansi di Iran. Pelaporan keuangan harus sesuai dengan hukum syariah yang melarang transaksi tertentu seperti yang melibatkan bunga (riba). Ini berarti bahwa instrumen dan transaksi keuangan harus disusun dan dilaporkan sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- g. Kode Etik Profesi: Untuk memastikan integritas dan kompetensi profesional akuntan dan auditor, *Iranian Association of Certified Public Accountants* (IACPA) mengeluarkan kode etik profesi. Kode etik ini mengatur perilaku profesional akuntan dan auditor, memastikan bahwa mereka bekerja dengan standar tinggi integritas dan kompetensi.

#### 4.3. Organisasi Profesi atau Akuntansi Pemerintah Iran

Di Iran, terdapat beberapa jenis organisasi profesi dan akuntansi yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan bidang akuntansi. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berperan dalam standar dan regulasi akuntansi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme praktisi akuntansi di negara ini. Beberapa di antaranya termasuk *Iranian Accounting Association* (IAA), *Iranian Association of Certified Public Accountants* (IACPA), dan *Iranian Institute of Certified Accountants* (IICA) (Deloitte, 2024).

#### **4.3.1. Iranian Accounting Association (IAA)**

*Iranian Accounting Association* (IAA) adalah sebuah organisasi profesional yang didirikan pada 2003 untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik audit di Iran (Dalci et al., 2013). Sebagai sebuah organisasi profesional yang terkemuka di Iran, IAA berperan penting dalam mengembangkan dan menyebarkan praktik terbaik dalam bidang akuntansi, audit, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, IAA juga berfungsi sebagai wadah bagi para anggotanya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan riset terkini dalam bidang akuntansi. Melalui konferensi, seminar, dan workshop yang diselenggarakan secara rutin, IAA membantu para praktisi akuntansi untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi akuntansi dan audit baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi ini juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah, institusi akademis, dan praktisi di lapangan, sehingga memfasilitasi kolaborasi dan dialog yang konstruktif untuk meningkatkan praktik akuntansi secara keseluruhan di Iran.

#### **4.3.2. Iranian Association of Certified Public Accountants (IACPA)**

*Iranian Association of Certified Public Accountants* (IACPA) adalah sebuah organisasi profesional yang mewadahi akuntan publik bersertifikasi di Iran yang didirikan pada tahun 1994 dan resmi beroperasi pada tahun 2001 (Modarres & Rafiee, 2011). Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan standar profesi akuntansi dan audit, mempromosikan etika profesi, dan menyediakan platform bagi anggotanya untuk mengembangkan tingkat kompetensi melalui penyelenggaraan dan pengelolaan sertifikasi (IACPA, 2024; Sepasi, 2019). Melalui berbagai program dan inisiatifnya, IACPA bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan akuntansi di Iran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Tidak hanya itu, sejak diberlakukannya IACPA, dinamika pasar telah mengalami perubahan signifikan dengan penerapan regulasi dan standar baru, yang menghasilkan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan kompetitif bagi sektor industri audit di Iran (Mohammadrezaei et al., 2013). Dengan terus memperkuat platform untuk pengembangan kompetensi anggotanya dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan regulasi, IACPA dapat terus berperan sebagai penjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi akuntansi di Iran. Dengan demikian, peran IACPA tidak hanya sebagai pengatur standar dan etika, tetapi juga sebagai agen perubahan positif dalam membentuk masa depan profesi akuntansi di Iran yang lebih kuat dan lebih profesional.

#### **4.3.3. Iranian Institute of Certified Accountants (IICA)**

*Iranian Institute of Certified Accountants* (IICA) didirikan pada tahun 1972 (Mohammadrezaei et al., 2013). IICA menekankan bahwa integritas moral seorang auditor menjadi landasan yang tidak dapat dikompromikan dalam menjalankan tugas profesional mereka (Fashami, 2015). Selain itu, IICA memiliki fokus tanggung jawab pada pengembangan program pelatihan dan pendidikan bagi para akuntan dan auditor, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan sesuai dengan etika yang berlaku (Chatterjee et al., 2010). Pemerintah telah memilih Iran Institute of Certified Accountants untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam mencapai standar profesional di bidang akuntansi, terutama dalam hal memberikan pendidikan profesional kepada calon peserta ujian IACPA (Mihret et al., 2020). Hal ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan kepada IICA dalam mendidik dan mempersiapkan para profesional akuntansi masa depan. Peran IICA tidak hanya terbatas pada sertifikasi akuntan dan auditor, tetapi juga pada pengembangan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan etika di sektor akuntansi Iran.

#### **4.4. Sertifikasi Akuntansi di Iran**

Di Iran, terdapat beberapa jenis sertifikasi akuntansi yang dapat diperoleh oleh para profesional di bidang ini. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek akuntansi, audit, dan manajemen keuangan, yang diakui oleh organisasi profesional terkemuka seperti *Iranian Association of Certified Public Accountants* (IACPA). Berikut ini adalah jenis-jenis sertifikasi akuntansi yang ada di Iran.

##### **4.4.1. Certified Public Accountant (CPA)**

Sertifikasi CPA di Iran menandakan bahwa pemegangnya memiliki keahlian tinggi dalam bidang akuntansi publik, audit, dan perpajakan. Ini adalah salah satu sertifikasi akuntansi yang paling dihormati dan diakui. Program CPA mencakup berbagai mata pelajaran, termasuk prinsip-prinsip akuntansi umum, pelaporan keuangan, audit, hukum bisnis, dan perpajakan. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, kandidat harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu serta lulus ujian yang terdiri dari beberapa bagian. Pemegang sertifikasi CPA dapat bekerja sebagai auditor publik, konsultan pajak, atau akuntan perusahaan di berbagai industri.

#### 4.4.2. *Certified Internal Auditor (CIA)*

Sertifikasi CIA menunjukkan keahlian dalam audit internal, pengendalian risiko, dan tata kelola perusahaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi standar dan peraturan yang relevan serta menjalankan operasinya dengan efisien. Program CIA mencakup audit internal, manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola. Ini juga melibatkan etika profesional dan penilaian kinerja. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, kandidat harus memiliki gelar sarjana, pengalaman kerja dalam audit internal, dan lulus ujian CIA yang terdiri dari tiga bagian. CIAs dapat bekerja sebagai auditor internal di berbagai organisasi, termasuk perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit. Mereka juga bisa berperan sebagai manajer risiko atau pengendali internal.

#### 4.4.3. *Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)*

*Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* adalah badan global yang menawarkan sertifikasi akuntansi yang diakui secara internasional, termasuk di Iran. Sertifikasi ACCA sangat dihargai di seluruh dunia dan mencakup tiga tingkatan utama: *Applied Knowledge, Applied Skills, dan Strategic Professional*. Ujian ACCA mencakup berbagai aspek akuntansi dan keuangan seperti manajemen keuangan, pelaporan keuangan, audit, perpajakan, dan etika profesional. Untuk mendapatkan sertifikasi ACCA, kandidat harus lulus serangkaian ujian dan memenuhi persyaratan pengalaman kerja. Sertifikasi ACCA memberikan pengakuan internasional, meningkatkan potensi gaji, dan memperluas peluang karir di bidang akuntansi dan keuangan.

#### 4.4.4. *Certified Management Accountant (CMA)*

*Certified Management Accountant (CMA)* yang ditawarkan oleh *Institute of Management Accountants (IMA)* adalah sertifikasi yang diakui secara global, yang berfokus pada akuntansi manajemen dan pengelolaan keuangan strategis. Sertifikasi ini dirancang untuk para profesional yang ingin mendalami bidang akuntansi manajemen dan mengambil peran strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk mendapatkan sertifikasi CMA, kandidat harus memiliki gelar sarjana, memiliki pengalaman kerja yang relevan, dan lulus dua bagian ujian CMA. Ujian CMA mencakup topik-topik seperti penganggaran, peramalan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan strategis. Sertifikasi CMA dapat meningkatkan peluang karir dan gaji bagi para profesional di bidang akuntansi manajemen, serta memberikan kompetensi yang diperlukan untuk mengelola keuangan perusahaan secara efektif.

#### 4.5. **Perbandingan Praktik Akuntansi Iran dengan Indonesia**

Secara umum, kedua negara berusaha untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan melalui standar akuntansi yang relevan dengan kondisi mereka masing-masing, meskipun adanya pendekatan dan tingkat adopsi IFRS berbeda. Indonesia cenderung lebih dekat dengan IFRS, sementara Iran mempertahankan lebih banyak aspek independensi dalam standar akuntansinya. Meskipun ada upaya untuk mengadopsi IFRS, Indonesia dan Iran tetap memiliki perbedaan dalam praktik akuntansi mereka yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan lokal. Berikut merupakan perbandingan antara praktik akuntansi di Iran dan Indonesia

**Tabel 1. Perbandingan Praktik Akuntansi Iran dengan Indonesia**

Keterangan	Iran	Indonesia
Penyajian Laporan Keuangan	Laporan keuangan Iran hanya terdiri dari 3 laporan yaitu <i>Profit or Loss Account, Auditor Report</i> dan <i>Balance Sheet</i> .	PSAK 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan Indonesia harus mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya, Laporan

		Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
	Penyajian laporan laba rugi terdiri dari 2 bagian yaitu bagian <i>income tax</i> dan <i>accumulated profit</i> .	Penyajian laporan laba rugi terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.
	Goodwill diamortisasi (disusutkan) selama maksimal 20 tahun	Goodwill tidak diamortisasi, melainkan harus dilakukan pengujian penurunan nilai secara berkala karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.
Kombinasi Bisnis	Menurut <i>Iranian Accounting Standards</i> (IRAS) No. 36, goodwill tidak diakui dalam transaksi akuisisi, namun akan dihitung dan diakuntansi pada tanggal merger, dengan batasan penyusutan hingga 20 tahun untuk aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.	PSAK 22 menetapkan bahwa Goodwill dievaluasi dan diukur pasca-akuisisi menggunakan metode penurunan nilai, dengan penyusutan mencerminkan pola manfaat ekonomi maksimal 20 tahun. Aset tidak berwujud lain, seperti hak paten dan merek dagang, juga disusutkan sesuai pola manfaat ekonomi dan estimasi umur ekonomis.
Aset Tetap	Menurut <i>Iranian Accounting Standards</i> (IRAS) No. 2, nilai sisa aset hanya berperan dalam perhitungan penyusutan awal, sedangkan masa manfaatnya dievaluasi secara tahunan untuk memastikan akuntansi yang tepat atas aset tetap tersebut.	PSAK 16 tidak membatasi penetapan nilai sisa hanya pada tahun pertama penyusutan. Justru, penetapan dan peninjauan nilai sisa dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun.
Investasi	Berdasarkan <i>Iranian Accounting Standards</i> (IRAS) No. 33, investasi di bursa efek dinilai dengan Nilai Jual Bersih ( <i>Net Sales Value</i> )	Dalam PSAK 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, investasi dalam instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar efek direvaluasi berdasarkan nilai wajar.
Komposisi Standar Akuntansi	Komposisi standar akuntansi Iran sebanyak 32 indikator dengan indikator pertama mengenai " <i>Presentation of Financial Statements</i> " sampai dengan indikator terakhir mengenai " <i>Decrease of Assets Value</i> "	Komposisi standar akuntansi Indonesia yaitu PSAK sebanyak 43 indikator per 1 Januari 2023 dengan PSAK 1 mengenai "Penyajian Laporan Keuangan" sampai dengan PSAK 73 mengenai "Sewa"
Tahun Anggaran	Di Iran, tahun anggaran dimulai pada 21 Maret dan berakhir pada 20 Maret tahun berikutnya, mengikuti kalender Persia.	Di Indonesia, tahun anggaran dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember, mengikuti kalender Gregorian.

Sumber: (IAI, 2023a, 2023b; Javadiankootanaee & Nagendrababu, 2013; Sadeghi & Yilmaz, 2024; Stanbic, 2023).

Berdasarkan perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun keduanya berusaha untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan melalui standar akuntansi yang relevan dengan kondisi lokal, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan aplikasi standar tersebut. Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), dengan mengadopsi struktur laporan keuangan yang lebih lengkap dan memperhitungkan aspek-aspek seperti goodwill dan aset tetap secara lebih terinci. Di sisi lain, Iran mempertahankan independensi lebih besar dalam pengaturan standar akutansinya, dengan fokus pada adaptasi lokal dan pengakuan yang berbeda terhadap elemen-elemen seperti goodwill dan investasi. Perbedaan dalam penetapan tahun anggaran serta perlakuan terhadap aset dan investasi mencerminkan perbedaan dalam pendekatan regulasi dan kebutuhan ekonomi masing-masing negara. Meskipun ada upaya untuk mengharmonisasi standar dengan praktik global, perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami konteks lokal dalam praktik akuntansi untuk mendukung kejelasan dan integritas informasi keuangan dalam konteks internasional yang semakin terhubung.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi di Indonesia dan Iran dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk budaya, sistem hukum, dan sosial masing-masing negara. Analisis dokumen menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kesamaan dalam penerapan standar akuntansi internasional, terdapat perbedaan yang signifikan dalam interpretasi dan penerapan praktik akuntansi karena pengaruh lokal. Di Indonesia, praktik akuntansi cenderung dipengaruhi oleh standar internasional yang lebih ketat dan tekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Di Iran, praktik akuntansi lebih dipengaruhi oleh peraturan nasional yang sesuai dengan konteks ekonomi dan sosial negara tersebut. Studi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual dalam pengembangan dan penerapan praktik akuntansi untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi regulator, praktisi dan akademisi untuk memahami dinamika akuntansi di lingkungan internasional dan lokal, dan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap konteks lokal dalam praktiknya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademis tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan kebijakan akuntansi di kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arja Sadjiarto. (1999). Akuntansi Internasional : Harmonisasi Versus Standardisasi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 1(2), 144–161.
- Bharata, R. W., Susilo, G. F. A., & Nugraheni, A. P. (2020). International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Proses Pengadopsiannya di Indonesia. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 06(02), 10–26.
- Chatterjee, B., Mirshekary, S., Al Farooque, O., & Safari, M. (2010). Users' Information Requirements and Narrative Reporting: The Case of Iranian Companies. *Business and Finance Journal*, 4(2), 79–96. <http://ro.uow.edu.au/aabfj>
- Christian, N., Angelica, S., & Tanwijaya, R. (2022). Perbandingan antara GAAP Indonesia dan GAAP Italia. *A Journal Management, Business, and Accounting*, 21(2), 149–158.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Perbandingan Praktik Akuntansi Indonesia dan Rusia. *Jurnal Multilingual*, 3(3), 350–367.
- Christian, N., Veronica, V., & Lim, L. (2021). Perkembangan Akuntansi Thailand dan Analisis Shenanigans pada Perusahaan Group Lease. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 329–344. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.475>
- Dalci, İ., Arash, H., Tümer, M., & Baradarani, S. (2013). Factors that Influence Iranian Students' Decision to Choose Accounting Major. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(2), 145–163. <https://doi.org/10.1108/20421161311288866>
- Darabi, R., & Salmani, K. (2012). A Comparative Study of Vietnamese and International Accounting Standards. *International Journal of Business and Commerce*, 1(12), 8–27. [http://www.jeasweb.org/jeas/Vol\\_S3\\_No\\_1\\_Oct\\_2020/SJEAS20201197211.pdf](http://www.jeasweb.org/jeas/Vol_S3_No_1_Oct_2020/SJEAS20201197211.pdf)
- Deloitte. (2024). *Accountancy Associations and Groups in Iran*. <https://www.iasplus.com/en/jurisdictions/asia/iran>
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, 9(1), 48–57.
- Dwihendra, D. D., & Finaldin, T. (2021). Konflik Amerika Serikat Dan Iran Pasca-Terbunuhnya Kepala Korps Quds Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Qasem Soleimani Pada 2020. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 118–139. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i1.58>
- Fashami, A. M. (2015). *An Evaluation of the Indicators of Threat to Auditor Independence in an Islamic Legal system: The Case of Iran*. [https://eprints.qut.edu.au/90735/4/Ashkan\\_Mirzay\\_Fashami\\_Thesis.pdf](https://eprints.qut.edu.au/90735/4/Ashkan_Mirzay_Fashami_Thesis.pdf)
- Harahap, I., Matondang, K., Saajidah, A., & Ginting, H. N. B. (2024). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 159–164. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1549>
- IACPA. (2024). *Iranian Association of Certified Public Accountants*. <https://en.iacpa.ir/>
- IAI. (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia 2021*.
- IAI. (2023a). *PSAK Umum*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/PSAKUmum#gsc.tab=0>
- IAI. (2023b). *SAK Efektif per 1 Januari 2023*. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-Umum-Efektif/SAKEfektifper1Januari2023#gsc.tab=0>
- IAI. (2024). *Tentang SAK Umum*.
- Indriani, E., Ramadhani, R. S., & Astuti, W. (2020). Standar Akuntansi Keuangan Dan Praktik Manajemen

- Laba Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(2), 226–237. <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i2.77>
- Javadankootanaee, A., & Nagendrababu, K. (2013). *Examine of Accounting Standards Setting Authorities in America , International and Iran*. 1(1), 1–13.
- Lestari, M. lestari. (2024). Perkembangan IFRS Di Dunia Dan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 77–82. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.504>
- Mashayekhi, B., & Mashayekh, S. (2008). Development of accounting in Iran. *The International Journal of Accounting*, 43(1), 66–86. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2008.01.004>
- Mihret, D. G., Mirshekary, S., & Yaftian, A. (2020). Accounting Professionalization, the State, and Transnational Capitalism: The Case of Iran. *Accounting, Organizations and Society*, 82(xxxx), 101091. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2019.101091>
- Modarres, A., & Rafiee, A. (2011). Influencing Factors on the Ethical Decision Making of Iranian Accountants. *Social Responsibility Journal*, 7(1), 136–144. <https://doi.org/10.1108/174711111111114594>
- Mohammadrezaei, F., Banimahd, B., & Saleh, N. M. (2013). Convergence obstacles with IASB standards: Evidence from Iran. *International Journal of Disclosure and Governance*, 10(1), 58–91. <https://doi.org/10.1057/jdg.2012.10>
- Natalis Christian, Arlina, Julie Tryany, & Vera Laurence Liang. (2024). Analisis Motivasi Fraud dengan Pendekatan Teori Fraud. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 16(1), 77–95. <https://doi.org/10.37151/jsma.v16i1.173>
- Prasetyanto, A., Hidayat, F. N., Haq, F. I., & Pratama, R. Y. (2023). Pengantar Akuntansi Internasional. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.30595/raar.v3i1.16116>
- Putra, T. A. P. S., Tusholihah, M., Retnawati, K., & Maje, G. I. L. (2019). Dampak dan Upaya Penerapan IFRS pada Pelaporan Keuangan Terhadap Perusahaan di Indonesia. *Jural Ilmiah AKuntansi Dan Keuangan Fair Value*, 1(2), 235–249.
- Sadeghi, P., & Yilmaz, F. (2024). Comparison of accounting systems between Iran and Turkey: income statement. *Balance*, 3(1). [http://www.jeasweb.org/jeas/Vol\\_S3\\_No\\_1\\_Oct\\_2020/SJEAS20201197211.pdf](http://www.jeasweb.org/jeas/Vol_S3_No_1_Oct_2020/SJEAS20201197211.pdf)
- Santia, T. (2023). *Perjanjian Dagang Indonesia-Iran PTA Ditandatangani, Pintu Ekspor ke Timur Tengah Terbuka Lebar*. KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Sepasi, S. (2019). Accounting Ethics. *International Journal of Ethics & Society (IJES)*, 2(1). <https://ijethics.com/article-1-31-en.pdf>
- Shuraki, M. G., Pourheidari, O., & Azizkhani, M. (2021). Accounting comparability, financial reporting quality and audit opinions: evidence from Iran. *Asian Review of Accounting*, 29(1), 42–60. <https://doi.org/10.1108/ARA-06-2020-0087>
- Sinatra, J. A., Manik, V. A., & Firmansyah, A. (2022). Dampak Adopsi International Financial Reporting Standards (Ifrs) Di Indonesia: Pendekatan Manajemen Laba Dan Relevansi Nilai. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 284–293. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1531>
- Stanbic. (2023). *Iran: Business Environment*. <https://www.tradeclub.stanbicbank.com/portal/en/market-potential/iran/accounting>
- Tyas, S. W., Febbi Valentya, G., Fajar Aditama, M., & Nidaul Husna, L. A. (2023). International Trade in the Era of Globalization. *ASIAN Economic and Business Development*, 6(1), 65–71. <https://doi.org/10.54204/aebd/vol6no1august2023009>
- Uno, M. O., Kalangi, L., & Pusung, R. J. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada Rumah Karawo di Kota Gorontalo). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3877–3898. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.7.3.2019.24891>